

# EVALUASI WEBSITE SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH (SKPD) PROPINSI LAMPUNG DALAM RANGKA IMPLEMENTASI *e-GOVERNMENT*

Oleh :

**Ida Nurhaida<sup>1)</sup> Kurnia Muludi<sup>2)</sup>, Noverman Djuadji<sup>3)</sup> Arlyandi S.Djauharie<sup>4)</sup>**  
<sup>1 dan 4)</sup> Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP, <sup>2)</sup> Jurusan Ilmu Komputer FMIPA, <sup>3)</sup> Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung

\*Alamat Korespondensi: Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung  
Jl. Sumanteri Brojonegoro Nomor 1, Bandar Lampung 35145, e-mail: idan@unila.ac.id

---

## Abstrak

Instruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-Government* mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja layanan publik melalui penerapan teknologi komunikasi dan informasi (TIK). Tahap awal implementasi *e-Government* tersebut adalah membangun website sebagai media informasi dan komunikasi layanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi website Pemerintahan Daerah Propinsi Lampung sebagai media komunikasi dan informasi. Untuk keperluan tersebut: 1) telah dikembangkan Rubrik Penilaian Website dengan unsur: a. kecepatan atau aksesibilitas, b. homepage pada website, c. desain, warna dan teks, d. Navigasi/menu dan Link, Usability, e. Isi (content) pada website, f. pembaharuan, g. layanan publik dan hits. 2) telah dilakukan sensus terhadap 58 SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Lampung, hanya 28 website yang bisa diakses. 3) Pengelompokan website dilakukan dengan kriteria baik (skor 74-93), cukup (skor 64-73) dan tidak baik (skor 44-63) dengan hasil 5 website katagori baik, 19 website katagori cukup dan 4 website katagori buruk. 4) Semua website SKPD di Propinsi Lampung masih dalam tahapan awal *e-government* (web presence) menurut kriteria Kominfo yaitu menyediakan informasi dasar.

Keywords : website pemerintah, *e-government*, rubrik *e-government*

## 1. Pendahuluan

Intruksi untuk melaksanakan *e-Government* di Indonesia telah dilakukan sejak 13 tahun yang lalu melalui Instruksi Presiden No 3 tahun 2003, namun implementasinya sampai tahun 2016 masih belum sesuai harapan. Tahun 2016 Indonesia mendapat peringkat ke 116 EGDI (*e-Government Development Index*), turun 10 peringkat dibandingkan tahun 2014 yang menduduki peringkat ke 106. Kondisi ini masih jauh berada di bawah negaranegara di Asia Tenggara seperti Malaysia (peringkat ke-60), Filipina (peringkat ke-71), dan Brunei Darussalam (peringkat ke-83). Artinya tujuan untuk meningkatkan layanan publik melalui penggunaan teknologi komunikasi dan informasi utamanya internet belum tercapai. Padahal penggunaan teknologi komunikasi dan informasi (TIK) dalam pemerintahan diyakini dapat membangun *good*

*governance* yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Studi yang dilakukan oleh World Bank (2006) dengan analisis ekonometrik memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dari suatu negara jika negara tersebut mengadopsi TIK. Penetrasi TIK seperti *broadband* sebesar 10% ternyata meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,38% pada negara berkembang dan 1,2% pada negara maju. Internet berdampak 1,12% untuk negara berkembang dan 0,77% untuk negara maju.

Implementasi *e-Government* sehingga dapat menjadi *enabler* kesejahteraan masyarakat dilalui melalui empat fase yaitu:

- a. *Fase pertama*, berupa penampilan *website* yang memuat konten informasi mendasar dari sisi kebutuhan masyarakat.
- b. *Fase ke dua*, merupakan fase interaktif dimana konten informasi yang ditampilkan lebih bervariasi, termasuk ketersediaan fasilitas *download* dan e-mail dalam *featur website* pemerintah.
- c. *Fase ke tiga*, tahap transaksi berupa aplikasi formulir untuk bertransaksi secara *online*.
- d. *Fase ke empat*, merupakan fase transformasi yang memfasilitasi layanan terintegrasi, yang selain menghubungkan antara pemerintah dengan masyarakat tetapi juga dengan organisasi lain yang terkait termasuk antarpemerintah, sektor nonpemerintah, serta sektor privat.

Karena itu untuk mengetahui apakah penyelenggaraan pemerintahan telah mengimplementasikan *e-government* atau tidak maka dapat ditelusur melalui representasi websitenya. Hasil Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) tahun 2015, *e-Government* pemerintah daerah Provinsi Lampung berada pada peringkat 17. Peringkat ini dikategorikan sebagai -KURANG|| dan masih berada pada golongan klaster tiga oleh Hernikawati yang menganalisis dimensi penilaian PeGi. Klaster tiga mengartikan provinsi yang memiliki nilai kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan paling rendah dibandingkan klaster-klaster lain atau rata-ratanya di bawah kelompok yang terbentuk (kelompok klaster 1, 2, dan 4) (Hernikawati, 2013: 67-70).

Tabel 1. Pemingkatan PeGi *e-Government* tingkat Provinsi 2015

PeGi Tingkat Provinsi Tahun 2015

| NO | PROVINSI                     | DIMENSI   |             |               |          |             | NILAI RATA-RATA | KATEGORI |
|----|------------------------------|-----------|-------------|---------------|----------|-------------|-----------------|----------|
|    |                              | KEBIJAKAN | KELEMBAGAAN | INFRASTRUKTUR | APLIKASI | PERENCANAAN |                 |          |
| 1  | Provinsi DKI Jakarta         | 3,50      | 3,40        | 3,37          | 3,57     | 3,13        | 3,39            | BAIK     |
| 2  | Provinsi Jawa Barat          | 2,80      | 3,07        | 3,20          | 3,13     | 3,13        | 3,07            | BAIK     |
| 3  | Provinsi Jawa Timur          | 3,27      | 3,20        | 3,20          | 2,80     | 2,57        | 3,01            | BAIK     |
| 4  | Provinsi Gorontalo           | 2,67      | 2,73        | 2,80          | 3,40     | 3,13        | 2,95            | BAIK     |
| 5  | Provinsi Bangka Belitung     | 2,50      | 3,00        | 3,20          | 2,79     | 3,00        | 2,90            | BAIK     |
| 6  | Provinsi D.I. Yogyakarta     | 2,90      | 2,50        | 2,50          | 2,80     | 2,60        | 2,66            | BAIK     |
| 7  | Provinsi Jawa Tengah         | 3,00      | 2,20        | 2,67          | 2,80     | 2,53        | 2,64            | BAIK     |
| 8  | Provinsi Bali                | 2,50      | 2,50        | 2,80          | 2,80     | 2,53        | 2,63            | BAIK     |
| 9  | Provinsi Sumatera Utara      | 2,67      | 2,87        | 2,53          | 2,50     | 2,53        | 2,62            | BAIK     |
| 10 | Provinsi Jambi               | 2,50      | 2,50        | 2,73          | 2,83     | 2,50        | 2,61            | BAIK     |
| 11 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 2,60      | 2,50        | 2,40          | 2,57     | 2,63        | 2,54            | BAIK     |
| 12 | Provinsi Kalimantan Timur    | 2,80      | 2,70        | 2,80          | 2,50     | 1,80        | 2,52            | BAIK     |
| 13 | Provinsi Aceh                | 2,33      | 2,33        | 2,53          | 2,53     | 2,80        | 2,51            | BAIK     |
| 14 | Provinsi Sumatera Selatan    | 2,20      | 2,33        | 2,53          | 2,20     | 2,40        | 2,33            | KURANG   |
| 15 | Provinsi Sumatera Barat      | 2,07      | 1,93        | 2,13          | 2,13     | 1,80        | 2,01            | KURANG   |
| 16 | Provinsi Kalimantan Selatan  | 2,00      | 2,00        | 1,53          | 1,93     | 1,93        | 1,88            | KURANG   |
| 17 | Provinsi Lampung             | 1,93      | 1,53        | 1,73          | 1,87     | 1,73        | 1,76            | KURANG   |
| 18 | Provinsi Sulawesi Tengah     | 1,87      | 1,93        | 1,53          | 1,67     | 1,67        | 1,73            | KURANG   |
| 19 | Provinsi Sulawesi Barat      | 1,60      | 1,53        | 1,60          | 2,07     | 1,80        | 1,72            | KURANG   |
| 20 | Provinsi Bengkulu            | 1,56      | 1,75        | 1,46          | 1,47     | 1,45        | 1,54            | KURANG   |
|    | RATA-RATA                    | 2,5       | 2,4         | 2,5           | 2,5      | 2,4         | 2,50            | BAIK     |

Sumber : [http://pegi.layanan.go.id/download/tabel\\_pegi\\_2015/](http://pegi.layanan.go.id/download/tabel_pegi_2015/) di akses pada tanggal 30 Januari 2016 pukul 11.00 wib

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang memiliki 58 Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) termasuk 12 Kabupaten dan 2 Kota perlu dianalisis lebih lanjut apakah mereka mempunyai website sebagai media komunikasi dan layanan publik pemerintah kepada masyarakat? Jika telah mempunyai website, sampai fase manakah website tersebut? Tujuan penelitian ini untuk menganalisis website pemerintah daerah yang ada di Provinsi Lampung sebagai media komunikasi dan informasi dalam rangka implementasi *e-Government*.

## 2. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah diseranaikan di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. menyusun Rubrik Penilaian website pemerintah daerah
2. mengevaluasi website Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Propinsi Lampung
3. menganalisis fase website SKPD di Propinsi Lampung

## 3. Tinjauan Pustaka

### Konsep *e-Government*

Penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara disebut *e-Government*, yang didefinisikan oleh World Bank sebagai:

*“E-Government adalah fasilitas TIK yang diadopsi oleh suatu institusi pemerintah yang mampu mengubah bentuk tata hubungan dengan warga negaranya, pelaku bisnis atau pun agen-agen lainnya”.*

Dalam konteks ini yang dimaksud dengan penggunaan TIK, umumnya terfokus pada penggunaan teknologi internet sehingga sering juga disebut *-online Government* walaupun sebenarnya juga termasuk penggunaan teknologi non internet seperti telepon, faksimil, jaringan dan layanan nirkabel, kartu identitas (KTP), kartu pintar (*smart card*) dan lainnya. Dengan demikian *e-government* didalamnya melibatkan otomatisasi dan komputerisasi pada prosedur *paper-based* yang ada.

Berbagai benefit dari adopsi dan penerapan *e-Government* antara lain misalnya, proses komunikasi berlangsung secara efisien dan efektif sehingga proses administrasi bisa berlangsung dalam hitungan jam, bukan lagi dalam hitungan harian, mingguan atau pun bulanan. Beberapa diantara benefit ini adalah (i) telah menjadikan segala layanan publik bagi rakyatnya menjadi begitu sangat cepat dan penyediaan informasi dapat diberikan 24 dalam sehari, (ii) dapat mengatasi keterbatasan dimensi ruang layanan, bisa terdistribusi di berbagai tempat termasuk dari kantor, rumah, atau perangkat *gadget* dimanapun tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan atau tempat-tempat pelayanan umum, (iii) penghematan sumberdaya termasuk biaya, waktu, maupun energi, (iv) makin terbukanya akses informasi bagi khalayak luas yang menjadi prasyarat bagi (v) demokratisasi dan transparansi di segala bidang layanan yang kemudian juga dapat bermuara dalam manfaat (vi) menekan penyalah-gunaan wewenang. Berbagai benefit ini menjadi semakin penting bagi negara yang sedang merancang penguatan proses desentralisasi tata pemerintahan melalui aras otonomi daerah.

### **Aplikasi *e-Government***

Ada 4 tingkatan atau fase pengembangan *e-Government* di Indonesia. Fase 1 adalah fase persiapan, meliputi pengembangan *situs web* yang dimaksudkan untuk menjalankan fungsi sebagai media informasi, dan komunikasi, dan sosialisasi baik untuk kalangan internal maupun publik. Fase 2 merupakan fase pematangan, yaitu berupa pengembangan *situs web* sebagai fasilitas informasi publik yang bersifat interaktif, termasuk pengembangan *interface* terhadap institusi lain yang lebih luas.

Fase 3 merupakan fase pematangan *situs web* yaitu pengembangan situs web dimana pengembangannya pembuatan *situs web* yang yang mampu meberikan layanan publik secara interaktif dan juga mampu memfasilitasi proses-proses operasionalitas layanan secara bersama atau sinergis dengan berbagai lembaga lain. Pada fase 4, yang merupakan fase akhir dalam siklus pengembangan *e-Goverenment* adalah tingkat pemanfaatan paripurna yang berisi pengembangan aplikasi untuk fasilitasi layanan yang bersifat *Government to Government* atau *G to G*, *Government to Business* atau *G<sub>2</sub>B*, *Government to Consumers* atau *G to C* (Kominfo, 2003).

Berdasarkan *guide line* dari Komimfo (2003) tersebut di atas maka dapat diinspkesi apakah suatu lembaga pemerintahan telah memfasiliatasi layanan publik dengan menerapkan *e-Government* ataukah belum dapatlah segera dan seketika diperoleh melalui situs *web* masing-masing. Esensinya merujuk dokumen tersebut bahwa berbagai kriteria berikut yang harus dipenuhi agar suatu pemerintah daerah telah menerapkan *e-Goverenment* meliputi:

1. Kinerja fungsi, aksesibilitas, dan nilai guna. Bahwa kandungan isi atau konten informasi suatu situs *web* pemerintah daerah haruslah punya orientasi pada kebutuhan khalayak atau masyarakat. Dalam kriterium ini, penekanannya adalah pada eradikasi terhadap muncul diskriminasi yang dialami pengguna. Situs *web* pemerintah daerah haruslah dapat dibuka tanpa membedakan kapasitas ataupun kecanggihan kemampuan komputer pengguna. Disain situs *web* pemerintah daerah juga harus profesional, menarik, dan memberikan kebergunaan yang nyata. Setiap kontennya haruslah disajikan secara jelas dan mudah dimengerti, baik itu berupa berita atau artikel.
2. Kinerja kerjasamanya. Situs *web* pemerintah daerah harus bisa saling membangun sinergi untuk menyatukan visi dan misi pemerintah. Setiap dokumen pemerintah yang mempunyai katagori penting haruslah memiliki URL yang bersifat tetap. Dengan begitu, setiap *search engine* dapat mengkoneksikan kepada informasi yang diinginkan oleh pengguna secara langsung.
3. Kinerja keefektivan konten. Situs *web* pemerintah daerah harus memudahkan khalayak pengguna dalam upaya mencari kandungan informasi yang disediakan dalam situs tersebut khususnya tentang data ataupun informasi terkini.
4. Kinerja proses komunikasi dua arah. Artinya situs *web* suatu pemerintah daerah juga memfailitasi terbanguyannya komunikasi yang bersifat dua arah atau interaktif termasuk memberikan kesempatan pengguna untuk melakukan kontak dengan pihak-pihak berwenang, mengemukakan argumen, pandangan atau bahkan membuat daftar pertanyaannya sendiri.
5. Kinerja *feed back*. Bahwa situs web pemerintah daerah haruslah

dilengkapi dengan fasilitas evaluasi derajat kesuksesan dalam upaya melayani kebutuhan khalayak pengguna. Minimal setiap situs web pemerintah daerah harus statistik pengguna, pengunjung, jumlah halaman, permintaan yang sukses dan tidak sukses serta yang terpenting harus menyangkan kinerja kepuasan pengguna.

6. Kinerja *search ability* dalam penemuan situs. Situs *web* pemerintah daerah haruslah dapat mempromosikan diri dengan cara mendaftarkannya ke berbagai *search engine* yang telah ada di dunia maya terutama sekali yang sudah populer di dalam masyarakat. Begitu pula promosi atau melakukan sosialisasi melalui pemberitahuan lewat pers, humas ataupun media komunikasi cetak seperti brosur, *leaf let*, selebaran, spanduk, baliho dan sebagainya.
7. Kinerja layanan prima. Dalam melakukan pemutakiran konten situs web-nya, pihak pemerintah daerah haruslah selalu menggunakan sumber-sumber yang memiliki kredibilitas yang tinggi, menggunakan strategi yang handa sesuai dengan tujuan maupun khalayak sasarannya. Strategi itu sendiri juga harus berorientasi kepada pengembangan masa depan, seperti yang dicikan oleh improvement pusat datanya yang bersifat dinamis sebagaimana media digital lainnya.

#### **4. Metode penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini dimulai dari bulan Juni sampai bulan Agustus 2016 terdiri atas:

- a) Sensus dan analisis representasi layanan publik  
Sensus terhadap website 58 SKPD Provinsi Lampung sebagai representasi layanan publik dalam rangka *e-government* termasuk 12 kabupaten dan 2 kota dan satu *website* milik pemerintahan Propinsi Lampung sebagai *bechmark*.
- b) Mengembangkan Rubrik Penilaian Website sebagai perangkat analisis isi website sebagai media komunikasi dan informasi layanan publik.
- c) Analisis isi website SKPD Provinsi Lampung dengan menggunakan Rubrik Penilaian Website.
- d) Klasifikasi website berdasarkan kriterium Baik, Cukup dan Buruk dan tahapan e-goverment tiap SKPD

#### **Teknik Pengumpulan Data:**

- 1) Dokumentasi: pengumpulan dokumentasi web situs S K P D pemerintah P rovinsi La mp u ng melalui unduh data secara menyeluruh .
- 2) Kepustakaan: berupa pengumpulan informasi melalui buku, majalah, artikel dan informasi yang ada dalam situs-situs di Internet

## 5. Hasil Penelitian

a) Sensus website SKPD Pemerintah Provinsi Lampung 30 Juni – 4 Juli 2016

Tabel 2. Hasil Sensus Webssite SKPD Provinsi Lampung

| SKPD Provinsi Lampung | Juml. | Bis | Tdk Bisa |
|-----------------------|-------|-----|----------|
| Kabupaten             | 1     | 11  | 1        |
| SKPD                  | 4     | 14  | 28       |
| Kota                  | 2     | 1   | 1        |
| Provinsi Lampung      | 1     | 1   | 0        |
|                       | 58    | 28  | 30       |

Sumber: Hasil penelitian 2016

b) Mengembangkan rubrik Penilaian Website

Tabel 3. Rubrik Penilaian Website

| N o. | Unsur Penilaian                        | Sangat baik   | Baik  | Cukup  | Kurang  | Buruk sekali   |
|------|--|---|---|--|---|--|
| 1)   | Kecepatan waktu akses (sumber Kominfo) | Kurang dari 5 detik   | Lebih dari 5 detik  | Kurang dari 10 detik   | Lebih dari 10 detik   | Lebih dari 15 detik  |
| 2)   | a. Bentuk <i>Homepage</i> yang menarik | Bentuk yang responsive, pemilihan tipografi yang tepat, adanya fixed menu & konten, minimalis, background full page, ada gambar dengan kualitas baik, adanya video. | Bentuk yang responsive, pemilihan tipografi yang tepat, adanya fixed menu & konten, minimalis, background full page, ada gambar dengan kualitas baik, tidak ada video | Bentuk yang responsive, pemilihan tipografi yang tepat, adanya fixed menu & konten, minimalis, background full page, gambar kurang berkualitas . Tidak ada video | Bentuk yang responsive, pemilihan tipografi yang tepat, adanya fixed menu & konten. | Bentuk yang kurang responsive, pemilihan tipografi yang kurang tepat, tidak adanya adanya fixed menu & konten. |
|      | b. <i>Contact Person</i>               | Website mencantumkan sosial media, alamat, telepon, dan e-mail  | Website mencantumkan, telepon, dan e-mail   | Website mencantumkan alamat dan telepon  | Website hanya mencantumkan alamat instansi terkait                                  | Website tidak mencantumkan satupun alamat  |

|    |  |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---|
|    |  |   |   |   |   | kontak  |
|    | c. Fitur tambahan  | adanya nama dan logo pemerintah terkait, adanya slide gambar atau menu, adanya buku tamu, serta terdapat link yang tersedia untuk di akses  | adanya nama dan logo pemerintah terkait, adanya slide gambar atau menu, serta terdapat link yang tersedia untuk di akses  | adanya nama dan logo pemerintah terkait, serta terdapat link yang tersedia untuk di akses   | adanya nama dan logo pemerintah, tidak ada link tambahan yang bisa di akses.  | Hanya ada nama dan tidak ada logo pemerintah terkait.   |
| 3) | Desain, warna dan teks   | Ada grafik, foto, <i>spalshpage</i> , animasi serta teks yang baik dan kontras dengan background  | Foto, <i>spalshpage</i> , animasi serta teks yang baik dan kontras dengan background  | Foto, animasi serta teks yang baik dan kontras dengan background  | Adanya animasi serta teks yang kurang kontras dengan background   | Hanya teks yang ada dalam website..   |
| 4) | Navigasi/Menu dan link   | Penataan navigasi yang baik, konsisten, memungkinkan <i>feedback</i> dan tidak ada navigasi yang non fungsional ( <i>broken link</i> ) serta tidak ada navigasi yang belum ada isinya | Penataan navigasi cukup baik, kurang konsisten, memungkinkan <i>feedback</i> , sering adanya navigasi yang <i>broken link</i> dan ada juga navigasi yang belum ada isinya | Penataan navigasi kurang baik, kurang konsisten, tidak ada <i>feedback</i> , sering adanya navigasi yang <i>broken link</i> dan ada juga navigasi yang belum ada isinya | Penataan navigasi kurang baik, kurang konsisten, tidak ada <i>feedback</i> , sering adanya navigasi yang <i>broken link</i> dan ada juga navigasi yang belum ada isinya | Penataan navigasi yang buruk, tidak konsisten, tidak ada <i>feedback</i> , banyak navigasi <i>broken link</i> dan banyak navigasi yang belum ada isinya |
| 5) | <i>Usability</i> (Efisien dalam penggunaan dan mudah untuk di ingat) | Menyediakan link terkait sehingga efisien dalam penggunaan dan dapat mencapai informasi dengan cepat,   | Menyediakan link terkait sehingga efisien dalam penggunaan dan dapat mencapai informasi   | Menyediakan link terkait sehingga efisien dalam penggunaan dan dapat  | Menyediakan link terkait sehingga efisien dalam penggunaan dan dapat mencapai   | Tidak menyediakan link terkait dan navigasi mudah di ingat  |



|    |  |   |  |  |  |  |
|----|--|---|--|--|--|--|
|    |  | setidaknya 4 link terkait atau lebih dan navigasi mudah di ingat.   | dengan cepat, setidaknya 3 link terkait dan navigasi mudah di ingat.   | mencapai informasi dengan cepat, setidaknya 2 link terkait dan navigasi mudah di ingat.  | informasi dengan cepat, setidaknya 1 link terkait dan navigasi mudah di ingat.   |  |
| 6) | Isi ( <i>content</i> ) pada website (sumber: Kominfo)<br><br>Isi minimal website | Website menjelaskan profil, kontak, peraturan/kebijakan, layanan, gallery, berita, unduhan dan buku tamu di dalam isi website.                        | Website menjelaskan profil, kontak, peraturan/kebijakan, layanan, gallery, berita dan unduhan di dalam isi website.                | Website menjelaskan profil, kontak, peraturan/kebijakan, layanan, gallery dan berita di dalam isi website.                                     | Website menjelaskan profil, kontak, peraturan/kebijakan, gallery dan berita di dalam isi website.  | Website menjelaskan profil, kontak, dan berita di dalam isi website.   |
|    | Isi berita pada website  | Menyajikan berita dari lingkungan pemerintah daerah terkait, melampirkan foto-foto kegiatan, video. Tidak memuat berita yang kadaluarsa.              | Menyajikan berita dari lingkungan pemerintah daerah terkait, melampirkan foto-foto kegiatan,. Tidak memuat berita yang kadaluarsa. | Menyajikan berita dari lingkungan pemerintah daerah terkait, tidak melampirkan foto-foto kegiatan, video. Tidak memuat berita yang kadaluarsa. | Tidak menyajikan berita dari lingkungan pemerintah daerah terkait, tidak melampirkan foto-foto kegiatan, video. Tidak memuat berita yang kadaluarsa. | Tidak menyajikan berita dari lingkungan pemerintah daerah terkait, tidak melampirkan foto-foto kegiatan, video. Memuat berita yang kadaluarsa. |
|    | Kualitas isi ( <i>content</i> ) website  | Isi konten pada website selalu up to date, akurat, menyatakan kebijakan dengan jelas, memuat foto maupun video, memuat informasi yang jelas dan mudah | Isi konten pada website selalu up to date, akurat, menyatakan kebijakan dengan jelas, memuat foto, memuat informasi                | Isi konten pada website selalu up to date, akurat, menyatakan kebijakan dengan jelas, memuat   | Isi konten pada website tidak up to date, kurang menyatakan kebijakan dengan jelas, memuat informasi yang kurang jelas dan                           | Isi konten pada website tidak up to date, tidak menyatakan kebijakan dengan jelas, tidak memuat  |

|    |                           |  |   |  |  |  |
|----|---------------------------|--|---|--|--|--|
|    |                           | dipahami.  | yang jelas dan mudah dipahami.  | informasi yang jelas dan mudah dipahami.   | mudah dipahami   | informasi yang jelas dan sulit dipahami  |
|    | Desain isi (content)      | Isi dari konten sesuai dengan visi dan misi website, informasi yang disampaikan singkat dan jelas, isi konten dilengkapi dengan foto, mudah dipahami dan ditelaah. | Isi dari konten sesuai dengan visi dan misi website, informasi yang disampaikan singkat dan jelas, mudah dipahami dan ditelaah.                                     | Isi dari konten website informasi yang disampaikan singkat dan jelas, mudah dipahami dan ditelaah.   | Isi dari konten website informasi yang disampaikan kurang singkat dan kurang jelas, sulit mudah dipahami dan ditelaah.                                       | Isi dari konten tidak sesuai dengan visi dan misi website, informasi yang disampaikan singkat dan tidak jelas, isi konten tidak dilengkapi dengan foto, sulit mudah dipahami dan ditelaah. |
| 7) | Pembaharuan isi (content) | Isi (content) website selalu diperbaharui, karena pengunjung selalu mencari kapan website diperbaharui isinya. Setidaknya setiap hari selalu diperbaharui.         | Isi (content) website selalu diperbaharui, karena pengunjung selalu mencari kapan website diperbaharui isinya. Setidaknya setiap 2 hari sekali selalu diperbaharui. | Isi (content) website selalu diperbaharui, karena pengunjung selalu mencari kapan website diperbaharui isinya. Setidaknya setiap minggu 3 kali diperbaharui. | Isi (content) website selalu diperbaharui, karena pengunjung selalu mencari kapan website diperbaharui isinya. Setidaknya setiap minggu sekali diperbaharui. | Isi (content) website selalu diperbaharui, karena pengunjung selalu mencari kapan website diperbaharui isinya. Setidaknya setiap minggu lebih dari diperbaharui.                           |
| 8) | Hits                      | Website pemerintah daerah mencantumkan data jumlah   | Website pemerintah daerah mencantumkan data   | Website pemerintah daerah mencantumkan data  | Website pemerintah daerah mencantumkan data  | Website pemerintah daerah tidak mencantumkan data  |

|  |  |  |  |   |  |                                      |
|--|--|--|--|---|--|--------------------------------------|
|  |  | pengunjung website seperti pengunjung per hari, jumlah hits, pengunjung online, data total pengunjung. | jumlah pengunjung website seperti pengunjung per hari, pengunjung online, data total pengunjung. | jumlah pengunjung website seperti pengunjung online dan total pengunjung. | jumlah pengunjung website seperti pengunjung online. | mkan data jumlah pengunjung website. |
|--|--|--|--|---|--|--------------------------------------|

Skoring: 5 = sangat baik 4 = baik 3 = cukup 2 = kurang 1 = buruk sekali.

c) Hasil analisis isi pada 28 website SKPD Propinsi Lampung

Tabel. 4. Analisis Isi website SKPD Provinsi Lampung

| No. | Alamat Website   | Aspek Penilaian Nomor/Jumlah Nilai |     |     |     |     |     |     |     | Total |
|-----|--|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
|     |  | (1)                                | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |       |
| 1.  | <a href="http://www.bappeda.lampungprov.go.id/">http://www.bappeda.lampungprov.go.id/</a>            | 5                                  | 13  | 15  | 7   | 10  | 20  | 2   | 10  | 82    |
| 2.  | <a href="http://www.bkpd.lampungprov.go.id/">http://www.bkpd.lampungprov.go.id/</a>                  | 2                                  | 12  | 12  | 9   | 13  | 13  | 1   | 9   | 71    |
| 3.  | <a href="http://www.bpmpd.lampungprov.go.id/">http://www.bpmpd.lampungprov.go.id/</a>                | 5                                  | 11  | 13  | 7   | 12  | 15  | 1   | 8   | 72    |
| 4.  | <a href="http://www.lampung.litbang.pertanian.go.id/">http://www.lampung.litbang.pertanian.go.id</a> | 5                                  | 10  | 12  | 9   | 11  | 15  | 1   | 5   | 68    |
| 5.  | <a href="http://dishub.lampungprov.go.id/">http://dishub.lampungprov.go.id/</a>                      | 5                                  | 11  | 13  | 7   | 8   | 15  | 1   | 5   | 65    |
| 6.  | <a href="http://www.diklat.lampungprov.go.id/">http://www.diklat.lampungprov.go.id/</a>              | 5                                  | 11  | 12  | 7   | 12  | 10  | 1   | 9   | 67    |
| 7.  | <a href="http://www.dinkes.lampungprov.go.id/">http://www.dinkes.lampungprov.go.id/</a>              | 4                                  | 14  | 12  | 9   | 14  | 23  | 3   | 6   | 85    |
| 8.  | <a href="http://www.diskominfo.lampungprov.go.id/">http://www.diskominfo.lampungprov.go.id/</a>      | 5                                  | 13  | 13  | 8   | 9   | 15  | 1   | 5   | 69    |
| 9.  | <a href="http://disnakertrans.lampungprov.go.id/">http://disnakertrans.lampungprov.go.id/</a>        | 5                                  | 6   | 8   | 5   | 10  | 7   | 1   | 2   | 44    |
| 10. | <a href="http://disnakkeswan.lampungprov.go.id/">http://disnakkeswan.lampungprov.go.id/</a>          | 5                                  | 6   | 12  | 7   | 10  | 15  | 1   | 5   | 61    |
| 11. | <a href="http://www.dkp.lampungprov.go.id/">http://www.dkp.lampungprov.go.id/</a>                    | 5                                  | 6   | 10  | 4   | 7   | 10  | 1   | 4   | 47    |
| 12. | <a href="http://www.dprd-">http://www.dprd-</a>  | 4                                  | 10  | 12  | 7   | 10  | 15  | 1   | 10  | 69    |

|    |   |   |    |    |    |    |    |   |   |    |
|----|---|---|----|----|----|----|----|---|---|----|
| .  | <a href="http://lampungprov.go.id/dprd/">lampungprov.go.id/dprd/</a>                            |   |    |    |    |    |    |   |   |    |
| 13 | <a href="http://www.investasi.lampungprov.go.id/">http://www.investasi.lampungprov.go.id/</a>   | 5 | 10 | 15 | 9  | 14 | 15 | 3 | 9 | 80 |
| 14 | <a href="http://www.kpud-lampungprov.go.id/">http://www.kpud-lampungprov.go.id/</a>             | 5 | 9  | 11 | 9  | 12 | 15 | 1 | 9 | 71 |
| 15 | <a href="http://lampungbaratkab.go.id">http://lampungbaratkab.go.id</a>                         | 2 | 10 | 13 | 7  | 13 | 20 | 4 | 6 | 75 |
| 16 | <a href="http://www.lampungselatankab.go.id/">http://www.lampungselatankab.go.id/</a>           | 5 | 11 | 11 | 7  | 14 | 18 | 3 | 6 | 75 |
| 17 | <a href="http://www.lampungtengahkab.go.id/">http://www.lampungtengahkab.go.id/</a>             | 4 | 8  | 12 | 10 | 15 | 15 | 1 | 4 | 69 |
| 18 | <a href="http://www.lampungutarakab.go.id/web1/">http://www.lampungutarakab.go.id/web1/</a>     | 5 | 9  | 11 | 6  | 13 | 13 | 2 | 4 | 63 |
| 19 | <a href="http://www.lampungprov.go.id/">http://www.lampungprov.go.id/</a>                       | 5 | 11 | 13 | 6  | 11 | 20 | 3 | 6 | 75 |
| 20 | <a href="http://www.lpse.lampungprov.go.id/eproc/">http://www.lpse.lampungprov.go.id/eproc/</a> | 5 | 8  | 11 | 6  | 8  | 11 | 1 | 5 | 55 |
| 21 | <a href="http://www.mesujikab.go.id/">www.mesujikab.go.id/</a>                                  | 4 | 11 | 12 | 6  | 13 | 20 | 3 | 6 | 75 |
| 22 | <a href="http://metrokota.go.id/">http://metrokota.go.id/</a>                                   | 5 | 7  | 11 | 5  | 12 | 21 | 5 | 9 | 75 |
| 23 | <a href="http://pesawarankab.go.id/">http://pesawarankab.go.id/</a>                             | 5 | 12 | 13 | 5  | 11 | 20 | 4 | 6 | 76 |
| 24 | <a href="http://www.regsikd.lampungprov.go.id/">http://www.regsikd.lampungprov.go.id/</a>       | 5 | 7  | 11 | 4  | 6  | 12 | 1 | 4 | 50 |
| 25 | <a href="http://tanggamus.go.id/">http://tanggamus.go.id/</a>                                   | 5 | 7  | 14 | 9  | 10 | 15 | 2 | 4 | 66 |
| 26 | <a href="http://tulangbawangkab.go.id/">http://tulangbawangkab.go.id/</a>                       | 4 | 12 | 13 | 10 | 13 | 22 | 4 | 6 | 84 |
| 27 | <a href="http://www.waykanankab.go.id/">http://www.waykanankab.go.id/</a>                       | 4 | 8  | 12 | 7  | 11 | 16 | 2 | 8 | 68 |
| 28 | <a href="http://www.lampungtimurkab.go.id/">http://www.lampungtimurkab.go.id/</a>               | 4 | 11 | 11 | 9  | 12 | 20 | 4 | 8 | 79 |

d) Katagorisasi Hasil Analisis Website

Pengelompokkan website dilakukan melalui penghitungan standar deviasi, nilai tengah dan rata-rata sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus : } S &= \sqrt{\frac{\sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{n}}{n-1}} \\
 S &= \sqrt{\frac{\sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{n}}{n-1}} \\
 &= \sqrt{\frac{136774 - \frac{(1936)^2}{28}}{28-1}} \\
 &= \sqrt{\frac{136774 - 133860,57}{27}} = \sqrt{\frac{136774 - 133860,57}{27}} \\
 &= \sqrt{\frac{2913,43}{27}} = \sqrt{107,9048} = 10,38772
 \end{aligned}$$

Dengan pembulatan standar deviasi menjadi 10 maka didapat interval data sebagai berikut :

Tabel 6. Interval nilai data

| No.    | Nilai   | Xi | Fi | FiXi |
|--------|---------|----|----|------|
| 1      | 44 - 53 | 47 | 3  | 141  |
| 2      | 54 - 63 | 61 | 3  | 183  |
| 3      | 64 - 73 | 69 | 11 | 759  |
| 4      | 74 - 83 | 75 | 9  | 675  |
| 5      | 84 - 93 | 84 | 2  | 168  |
| Jumlah |         |    | 28 | 1926 |

Sementara rata-rata diperoleh dengan rumus:

$$\bar{x} = \frac{\sum fixi}{\sum fi}$$

Keterangan :

$\bar{x}$  = score atau rata-rata (mean)

fi = frekuensi

xi = nilai tengah

Sehingga didapat nilai rata-rata sebagai berikut :

$$= \frac{1926}{28} = 68,78571$$

28

Pengelompokkan data pada nilai tertinggi, tengah dan terendah dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tinggi} = \bar{X} + \text{stdDev} \quad (68,78571+10,38772) \quad = 79,17 \text{ katagori Baik}$$

$$\text{Sedang} = \bar{X} \quad (68,78571) \quad = 68,78 \text{ katagori Cukup}$$

$$\text{Rendah} = \bar{X} - \text{StdDev} \quad (68,78571-10,38772) \quad = 58,4 \text{ katagori buruk}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut maka pengelompokkan website sebagai berikut:

Tabel 5. Data website berdasarkan kategori tidak baik, cukup dan baik

| No. | Kategori Baik (Nilai 74-93)   | Kategori Cukup (Kategori 64-73)   | Kategori Buruk (Nilai 44-63)  |
|-----|---|---|---|
| 1   | <a href="http://www.lampungtimurkab.go.id/">http://www.lampungtimurkab.go.id/</a>             | <a href="http://www.bkpd.lampungprov.go.id/">http://www.bkpd.lampungprov.go.id/</a>                   | <a href="http://disnakertrans.lampungprov.go.id/">http://disnakertrans.lampungprov.go.id/</a>   |
| 2   | <a href="http://tulangbawangkab.go.id/">http://tulangbawangkab.go.id/</a>                     | <a href="http://www.bpmpd.lampungprov.go.id/">http://www.bpmpd.lampungprov.go.id/</a>                 | <a href="http://www.dkp.lampungprov.go.id/">http://www.dkp.lampungprov.go.id/</a>               |
| 3   | <a href="http://www.investasi.lampungprov.go.id/">http://www.investasi.lampungprov.go.id/</a> | <a href="http://lampung.litbang.pertanian.go.id/ind/">http://lampung.litbang.pertanian.go.id/ind/</a> | <a href="http://www.lpse.lampungprov.go.id/eproc/">http://www.lpse.lampungprov.go.id/eproc/</a> |
| 4   | <a href="http://www.bappeda.lampungprov.go.id/">http://www.bappeda.lampungprov.go.id/</a>     | <a href="http://dishub.lampungprov.go.id/">http://dishub.lampungprov.go.id/</a>                       | <a href="http://www.regsikd.lampungprov.go.id/">http://www.regsikd.lampungprov.go.id/</a>       |
| 5   | <a href="http://www.dinkes.lampungprov.go.id/">http://www.dinkes.lampungprov.go.id/</a>       | <a href="http://www.diklat.lampungprov.go.id/">http://www.diklat.lampungprov.go.id/</a>               |   |
| 6   |   | <a href="http://www.diskominfo.lampungprov.go.id/">http://www.diskominfo.lampungprov.go.id/</a>       |   |
| 7   |   | <a href="http://disnakeswan.lampungprov.go.id/">http://disnakeswan.lampungprov.go.id/</a>             |   |
| 8   |   | <a href="http://www.dprd-lampungprov.go.id/dprd/">http://www.dprd-lampungprov.go.id/dprd/</a>         |   |
| 9   |   | <a href="http://www.kpud-lampungprov.go.id/">http://www.kpud-lampungprov.go.id/</a>                   |   |
| 10  |   | <a href="http://lampungbaratkab.go.id">http://lampungbaratkab.go.id</a>                               |   |
| 11  |   | <a href="http://www.lampungselatankab.go.id/">http://www.lampungselatankab.go.id/</a>                 |   |
| 12  |   | <a href="http://www.lampungtengahkab.go.id/">http://www.lampungtengahkab.go.id/</a>                   |   |
| 13  |   | <a href="http://www.lampungutarakab.go.id/web1/">http://www.lampungutarakab.go.id/web1/</a>           |   |
| 14  |   | <a href="http://www.lampungprov.go.id/">http://www.lampungprov.go.id/</a>                             |   |
| 15  |   | <a href="http://www.mesujikab.go.id/">www.mesujikab.go.id/</a>  |   |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 16 |  | <a href="http://metrokota.go.id/">http://metrokota.go.id/</a>             |  |
| 17 |  | <a href="http://pesawarankab.go.id/">http://pesawarankab.go.id/</a>       |  |
| 18 |  | <a href="http://tanggamus.go.id/">http://tanggamus.go.id/</a>             |  |
| 19 |  | <a href="http://www.waykanankab.go.id/">http://www.waykanankab.go.id/</a> |  |

## 5. Pembahasan

Pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah sudah merupakan sebuah keharusan. Disebutkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pengembangan *e-Government* di Indonesia dilaksanakan melalui empat tingkatan. Pertama, Tingkat Persiapan: yang berupa pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga serta sosialisasi situs web untuk internal dan publik. Kedua, Tingkat Pematangan: yang berupa Pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif dan Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain. Ketiga, Tingkat Pematapan: yang berisi Pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik dan Pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain. Keempat, Tingkat Pemanfaatan: yang berisi Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), Government to Consumers (G2C).

Di provinsi Lampung sendiri terdapat 58 situs website SKPD namun pada kenyataannya hampir separuhnya, 30 situs tidak bisa diakses. Sementara dari 28 situs website SKPD di provinsi Lampung yang dapat diakses baru berada pada tahap pertama yaitu berupa pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga serta sosialisasi situs web untuk internal dan publik. Karakteristik interaktif seperti tersedianya fitur faq, email, unduh dan unggah, aplikasi dan link belum semua web memiliki.

Dari 28 website tersebut didapatkan hasil sebanyak 4 website masuk kedalam kategori baik, sebanyak 19 website masuk kedalam kategori cukup dan 5 website masuk kedalam kategori buruk. Untuk memperoleh informasi tiap katagori maka diambil sampel satu website pada tiap katagori dengan cara undian, maka diperoleh sampel: pada kategori baik yaitu website kabupaten Tulang Bawang kemudian untuk kategori cukup website kabupaten Lampung Utara dan untuk kategori buruk yaitu website Dinas kelautan dan perikanan. Untuk mendapatkan gambaran website sebagai media komunikasi dideskripsikan salah satu dari website terbaik dengan nilai total tertinggi yaitu website Kabupaten Tulang Bawang (skor 84)

## Kategori Baik

Website yang masuk kedalam kategori baik sebanyak 4 website yaitu kabupaten Lampung Timur, kabupaten Tulang Bawang, BKMPT, Bappeda dan dinas kesehatan. Dalam kategori baik ini deskripsi dilakukan pada website Kabupaten Tulang Bawang sebagai sampel pada kategori ini. Berikut ini analisis terhadap website Kabupaten Tulang Bawang :

### a. Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan kecepatan *loading* untuk tampil secara utuh dari semua beban suatu situs yang diukur dalam bilangan detik. Dalam hal ini website kabupaten Tulang Bawang memiliki aksesibilitas rata-rata kurang dari 5 detik Ini menunjukkan bahwa website tersebut peduli akan pelayanan melalui media online sebab aksesibilitas lebih dari 5 – 10 detik akan menyebabkan pengguna situs enggan untuk menunggu sampai *loading* selesai. Bukan hanya itu saja *loading* yang terlalu lama akan menyebabkan kurangnya nilai pelayanan dari Pemda itu sendiri. Karakteristik e-government sebagai layanan cepat menjadi tidak sesuai.

### b. *Homepage* dan desain

*Homepage* pada suatu situs web merupakan halaman pertama yang akan dibuka oleh pengunjung. Suatu bentuk *homepage* yang menarik akan memberi kesan tersendiri bagi pengunjung untuk mengetahui lebih jauh tentang isi dari situs web pemerintah. Dalam hal ini website kabupaten Tulang Bawang memiliki desain yang menarik yaitu sebagai berikut :



Gambar 2. *Homepage* dan desain website kabupaten Tulang Bawang

Bentuk *homepage* pada website ini memiliki identitas yang mudah dikenali oleh pengguna, artinya pada *homepage* dicantumkan nama dan simbol Pemda. Lalu mencantumkan alamat kantor, nomor telepon dan fax, serta memuat kontak e-mail untuk menyampaikan suatu permintaan atau keterangan, dan memuat *link* yang dapat diakses dengan isi yang tersedia pada situs web pemerintah tersebut dan menyediakan navigasi untuk memudahkan pengguna untuk mencari data yang dicari dan penataan



navigasi/menunya pun sudah baik, sehingga membuat pengunjung mudah mencari sebuah informasi.

Desain adalah merupakan aplikasi tampilan situs web yang terdiri dari animasi, grafis dan teks disertai penempatan layout dan navigasi menu. Berikut ini desain dari website kabupaten Tulang Bawang :



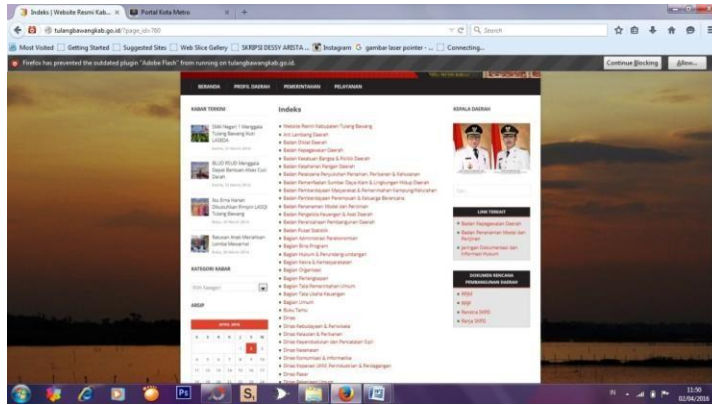
Gambar 3. Desain website kabupaten Tulang Bawang

Web yang menggunakan desain secara lengkap yang terdiri dari animasi, grafis dan teks. Website Kabupaten Tulang Bawang tidak terdapat animasi juga pada semua web yang dianalisis. Alasannya didasari dengan pertimbangan yang dilakukan oleh pengelola website adalah karena faktor aksesibilitas. Dikhawatirkan apabila web pmda menggunakan animasi berlebihan akan mengurangi kecepatan *loading website* ketika mengakses website. Sebagian besar web pmda hanya menggunakan animasi yang sederhana dan umumnya digunakan untuk merujuk pada *link* yang penting atau untuk *running text greeting*.

Lalu dalam segi penyusunan *layout* sebagai strategi kreatif dalam penyampaian informasi, website ini menggunakan *layout* yang disesuaikan dengan keseimbangan warna antara gambar dan tulisan sehingga enak untuk dilihat, mudah dipahami dan tidak padat.

### c. Usability

*Usability* merupakan pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan aplikasi atau situs web sampai pengguna dapat mengoperasikannya dengan mudah dan cepat. Peneliti sebagai pengguna telah merasakan kemudahan dalam mempelajari isi dari web ini sebab dalam menyediakan link seperlunya saja sehingga informasi yang diperlukan didapatkan dengan cepat dan mudah. Sedang sistem navigasi dan menu yang mudah untuk diingat serta tingkat kesalahan pun rendah dengan tidak adanya link yang tidak berfungsi (*broken link*) atau halaman masih dalam proses pembuatan (*under construction*).



Gambar 4. Usability website kabupaten Tulang Bawang

d. Isi (*content*)

Situs website Kabupaten Tulang Bawang telah memenuhi standar isi minimal web pemda yang dikeluarkan oleh KOMINFO, seperti :

1. Selayang Pandang  
Menjelaskan secara singkat tentang keberadaan Pemerintah Daerah bersangkutan (sejarah, motto daerah, lambang dan arti lambang, lokasi dalam bentuk peta, visi dan misi).
2. Pemerintahan Daerah  
Menjelaskan struktur organisasi yang ada di Pemerintah Daerah bersangkutan (eksekutif, legislatif) beserta nama, alamat, telepon, e-mail dari pejabat daerah. Jika memungkinkan biodata dari Pimpinan Daerah ditampilkan agar masyarakat luas mengetahuinya.
3. Geografi,  
Menjelaskan antara lain tentang keadaan topografi, demografi, cuaca dan iklim, sosial dan ekonomi, budaya dari daerah bersangkutan. Semua data dalam bentuk numeris atau statistik harus mencantumkan nama instansi dari sumber datanya.
4. Peta Wilayah dan Sumberdaya  
Menyajikan batas administrasi wilayah dalam bentuk peta wilayah (digunakan peta referensi yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional – Bakosurtanal, atau instansi pemerintah lainnya yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembuat peta), dan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah bersangkutan dalam bentuk peta sumberdaya (peta referensi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembuat peta) yang dapat digunakan untuk keperluan para pengguna.

## 5. Peraturan/Kebijakan Daerah

Menjelaskan Peraturan Daerah (Perda) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bersangkutan. Melalui situs web pemerintah daerah inilah semua Perda yang telah dikeluarkan dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas.

## 6. Buku Tamu

Tempat untuk menerima masukan dari pengguna situs web pemerintah daerah bersangkutan (KOMINFO, 2003, 47)



Gambar 5. Isi (*content*) dari website Kabupaten Tulang Bawang Selain

isi minimal seperti tersebut diatas, pada website ini juga ditambahkan isi informasi yang berisi tentang informasi umum, khusus, pendidikan serta informasi perniagaan. Artinya, ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah baik pemprov dan pemkot/pemkab memiliki motivasi guna membangun *good governance* dalam dunia virtual melalui penyediaan informasi yang lengkap kepada masyarakat.

### e. Pembaharuan

Pembaruan merupakan pemuktahiran data pada suatu isi (*content*) sebuah situs web. Pengunjung akan selalu mencari informasi kapan situs web dimutakhirkan isinya. Berikut ini gambar isi berita pada website :

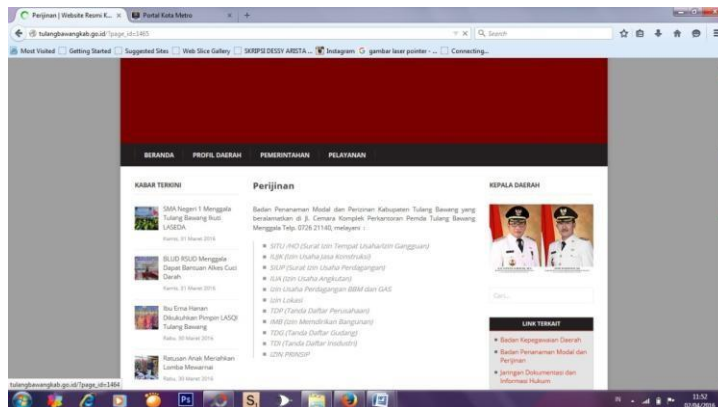


Gambar 6. Isi berita pada website kabupaten Tulang Bawang

Dalam hal ini pada website ini sudah melakukan pembaharuan isi websitenya setiap hari sehingga data yang dipublikasikan pada website tersebut selalu *up to date* seperti berita yang berkaitan pemda terkait serta agenda kegiatan yang dilakukan serta dokumentasi sehingga pengguna dapat mengetahuinya.

f. Layanan publik dan hits

Salah satu tujuan dari *e-Government* adalah memberikan layanan publik secara elektronik melalui media situs web pemerintah. Berikut ini adalah bentuk informasi terkait pelayanan publik :



Gambar 7. Informasi layanan publik pada website Kab.Tulung Bawang

Informasi layanan publik baru pada tahapan memberikan informasi berbagai layanan publik yang dilakukan pemerintah, sedang yang bersifat transaksi, unduh dan unggah belum tersedia. Sedangkan hits dalam website kategori baik sudah memberikan informasi mengenai jumlah pengunjung situs web pada satu hari atau bulan tertentu.

Secara umum terlihat bahwa pengelolaan situs web pemda di SKPD Propinsi Lampung baru pada tahap awal penyelenggaraan *e-government*, yaitu website hanya sebagai media informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Artinya sangat berbeda dengan keyakinan dunia (lihat pernyataan World Bank pada kontribusi TIK terhadap ekonomi dunia, 2006), pemerintah daerah Propinsi Lampung melalui SKPDnya belum atau tidak meyakini TIK dapat menjadi sarana dalam *good governance* yang pada akhirnya tercapainya tujuan mensejahterakan masyarakat. Jika dilihat lebih dalam kondisi ini dapat dimengerti karena dalam konteks tertentu pihak pejabat publik banyak yang lahir sebelum tahun 1980-an yang sering disebut generasi *immigrant digital* sehingga sulit untuk mempunyai cara pandang yang sama terhadap manfaat TIK dalam penyelenggaraan *good governance*.

Dari segi pengelolaan situs, umumnya diserahkan pada badan yang memiliki keterkaitan dengan penyampaian informasi, umumnya Kantor Humas dan Informasi atau diserahkan pada Kantor Pengolahan Data Elektronik. Penyerahan

pada dua badan tersebut sesungguhnya tidak salah sebatas dalam konteks manajerial dan pengelolaan, namun bila tidak ada sinergi dan kerjasama dengan bagian lain di SKPD tersebut maka umumnya informasi yang disampaikan dalam web tidak akan lengkap. Selain itu, ke-tidakadaan hal tersebut menyebabkan integritas layanan transaksional yang diharapkan pada setiap situs tidak akan terwujud.

## 7. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan:

1. Jumlah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Propinsi Lampung adalah 58, dan yang memiliki website yang dapat diakses sejumlah 28 SKPD.
2. Rubrik Penilaian Website telah disusun dengan 8 unsur penilaian yaitu; a)kecepatan atau aksesibilitas, b) homepage pada website, c) desain, warna dan teks, d) Navigasi/menu dan Link, Usability, e) Isi (content) pada website, f) pembaharuan, g) layanan publik dan hits. Skoring menggunakan skala likert 5, 4, 3,2, 1 dengan nilai sangat baik, baik, cukup, tidak baik dan sangat tidak baik.
3. Kriteria pengelompokkan website dilakukan dengan cara mengukur rata-rata skor website dan standar deviasi, maka terbentuk kriteria baik (skor 74-93), cukup (skor 64-73) dan tidak baik (skor 44-63).
4. Kelompok website SKPD di Lingkungan Propinsi Lampung terdiri atas: 5 website katagori baik yaitu kabupaten Lampung Timur, kabupaten Tulang Bawang, BPMPPT, Bappeda dan dinas kesehatan, 19 website katagori cukup yaitu Badan Ketahanan Pangan daerah, BPMPD, Litbang Pertanian, Dinas Perhubungan, Badan Diklat Daerah, Diskominfo, Dinas Peternakan, DPRD, KPUD, Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Provindi Lampung, Kab. Mesuji, Kota Metro, Kab. Pasawaran, Kab. Tanggamus dan Kab. Way Kanan dan 5 website katagori buruk yaitu .Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kelautan dan Perikanan, LPSE, RegSIKD.
5. SKPD yang seharusnya menjadi contoh seperti Dinas Kominfo, Pemerintah Provinsi masuk pada katagori cukup yaitu kondisi website serba minimal.
6. Semua website SKPD di Propinsi Lampung masih dalam fase awal e-government (*web presence*) menurut kriteria Kominfo yaitu menyediakan informasi dasar.

## Saran/ Rekomendasi

Pedoman yang dibuat oleh Kominfo dalam pengelolaan *e-Government* tidak menjelaskan siapa yang lebih diberikan kewenangan dan tanggung jawab sebagai pengelola situs pemda. Interpretasi terbuka pun akhirnya dilakukan oleh masing-masing pihak pemda dalam menjabarkannya, oleh karenanya dari 28 situs web pemda yang diteliti tidak ada kesamaan pada badan yang mengelola

situs. Beberapa situs dikelola oleh *web hosting* yang hanya faham pada teknik tetapi kurang profesional dari segi isi. Saran yang dapat ditawarkan adalah pengelolaan situs sebaiknya dilakukan oleh suatu tim atau divisi tersendiri. Divisi tersebut bernaung dibawah Kantor Humas/kabag humas. Divisi tersebut dapat dinamakan sebagai divisi *e-gov* atau divisi teknologi informasi. Pada strukturnya divisi tersebut terdiri dari seorang ketua tim/kepala yang di bantu oleh beberapa staf ahli. Staf ahli adalah terdiri dari staf ahli teknik, staf ahli pelayanan dan interaktif serta staf ahli penyedia content. Jumlah personil dalam divisi tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan akan permintaan pelayanan dan *traffic* informasi.

Kualifikasi dari divisi atau tim *e-gov* kecuali staf ahli teknis dan penyedia content adalah rata-rata menguasai aplikasi software *internet explorer, microsoft outlook, e-mail* dan *chatting*. Sementara bagi staf ahlipenyedia *content* memerlukan kualifikasi penguasaan *software web* seperti *dreamweaver, front page* dan *macroflash* plus aplikasi grafis. Sementara khusus staf ahli teknis selain penguasaan aplikasi software yang telah disebutkan diatas juga harus memiliki penguasaan aplikasi setting jaringan, perakitan *hardware* dan instalasi.

## DAFTAR PUSTAKA

Hernikawati, Dewi. (2013) Kajian Implementasi e-Government Tingkat Propinsi di Indonesia, Jakarta: Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia.

Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Kominfo (2003). Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e- Government Lembaga: Jakarta, Kominfo, 2003.

World Bank (2006). Global Trends and Policies. The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank; Washington, DC.

[http://pegilayanan.go.id/download/tabel\\_pegilayanan\\_2015/](http://pegilayanan.go.id/download/tabel_pegilayanan_2015/) di akses pada tanggal 30 Januari 2016 pukul 11.00 wib